

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Arifin, Z. (2011). *Penelitian Pendidikan: Metode Dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Clark, T., Foster, L., Sloan, L., & Bryman, A. (2021). *Bryman's Social Research Methods* (6th ed.). Oxford University Press.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi kedua). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fathoni, M. P. d. I. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Hernimawati, M.Si. (2018). *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Jakat Media Publishing.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta*. Gorontalo: UNG Press.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi,*

dan Evaluasi Kebijakan Publik. Leutikaprio.

Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Kontemporer*. Elex Media Komputindo.

Sore, U. B. B., & Sobirin, S. S. (2017). *Kebijakan Publik*. CV Sah Media.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syahrudin, S.E., M.Si. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi Kasus*. Penerbit Nusa Media.

Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. APII Bandung-Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

Wahab, H. S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal dan Skripsi:

Ali, M. (2015). Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective. *Dialogue (Pakistan)*, 10(1).

- Annisa, K. N., Rosyadi, S., & Sulistiani, L. S. (2022). Performance of Relocation Policy Implementation at Purbalingga Food Center. *Jurnal Public Policy*, 8(4), 2502-0528.
- Fusheini, A., & Marnoch, G. (2020). Dialogue as a Tool for Improving Policy Implementation: Lessons from Ghana. *Routledge Taylor Francis Group: Policy Design and Practic* 3:4, 387-400.
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy Failure and the Policy Implementation Gap: Can Policy Support programs Help? *Routledge Taylor Francis Group: Policy Design and Practic* 2:1, 1-14.
- Katili, A. Y., Rachman, E., & Van Gobel, L. (2023). Program Policy Implementation Child Friendly District. *Public Policy Journal*, 4. E-ISSN: 2746-4490.
- Mahmud Ridho Ardi, Agus Subianto, & Sudirman. (2020). Implementation of Indonesia's Marine Policy a Case Study: (Implementation of Presidential Regulation No. 16 of 2017 Concerning Indonesian Maritime Policy, Specifically Maritime Diplomacy in Papua). *International Journal of ASRO*, 11(02), 01-07.
- Monalisa. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun*. (Master's thesis, Universitas Terbuka).
- Morwarin, K., & Lionardo, A. (2022). Local Based Performance dalam

Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(1).

Peeples, E. J. (2021). People, Policy, and Praxis: Freirean Pedagogy and Local-Level Policy Implementation. *Current Issues in Comparative Education (CICE)*, 23(2), Special Issue 2021.

Pratama, Y. D. (2021). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan Seksual di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak (Studi Kasus Pernikahan Anak Dibawah Umur)*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Ramadhan, M. K., & Andari, Y. (2021). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 2021 (Studi Kasus Pada Sub Bagian Program Di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.

Sari, D. N. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Bappeda Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Manajemen Ilmu Administrasi Publik*, 4(4), 1-10.

Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 1-22.

Yanti Aneta, & Syamsul Baharuddin. (2022). Implementation of PAMSIMAS Policy in the Perspective of Planning, Implementation, and Supervision in Gorontalo District. *Public Policy Journal* 2746- 4490.

Yue Sokseleuy (2020) Policy Implementation: Fishery Policy Related to Local Government Management. *International Journal Papier Public Review*. 1(1), 15-19. ISSN: 2709-023X.

Undang-Undang:

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indonesia. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Indonesia. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK)

Pemerintah Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor 823 Tahun 2023 mengatur tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pemerintah Indonesia. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber lain:

Bappeda Provinsi Bangka Belitung. (n.d.). *Pengenalan Singkat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Perencanaan*. Diakses pada 11 November 2024, dari <https://bappeda.babelprov.go.id/content/pengenalan-singkat-sistem-informasi-pemerintahan-daerah-sipd-perencanaan>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.). *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*. Diakses pada 10 November 2024, dari <https://sipd.kemendagri.go.id/landing>